

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTTK) Kabupaten Balangan tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Renja DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini. Kami menyadari Renja ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Renja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Demi kesempurnaan Renja ini untuk meningkatkan kinerja DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, kami menerima kritikan dan saran yang membangun

Paringin, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan Renja.....	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSPTTK Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022.....	7
2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi.....	23
2.2.2 Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka.....	26
2.2.3 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.....	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSPTTK Kab. Balangan.....	33
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan.....	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Daerah.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	45
3.3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024.....	47
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSPTTK Tahun 2024.....	53
4.2. Analisis Sosial Ekonomi.....	76
BAB V. PENUTUP.....	78

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen rancangan awal rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja SKPD 2024 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Awal Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang antara lain:

- a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- b. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dikembangkan untuk makin memperkuat peranan program ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya lainnya yang semakin terbatas. Dengan dilatarbelakangi keterbatasan sumber daya yang tersedia serta peluang dan tantangan yang harus dihadapi maka disusunlah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahunan 2024.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, selaras dengan Renstra Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 dijadikan salah satu dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja ,dan transmigrasi serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan urusan

penanaman modal, tenaga kerja, dan transmigrasi untuk tahun 2024 sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan Renja

Sistematika penulisan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSPTTK Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSPTTK

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 yang didasarkan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022, ada perubahan yang cukup signifikan terkait indikator kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2022 sangat baik, yaitu sebesar Rp. **13.127.898.486,-** atau sebesar 87,65 % dari total anggaran belanja langsung langsung dan tidak yang dialokasikan sebesar Rp. **14.977.488.447,-**

Anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
		Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	120.702.000	117.699.208	325,03%	97,51%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	120.702.000	117.699.208	139,30%	97,51%
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	120.702.000	117.699.208	100,00%	97,51%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.650.573.100	2.453.616.799	658,25%	92,57%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.473.903.100	2.286.296.999	689,26%	92,42%
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	765.310.200	731.672.999	100,00%	95,60%
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	368.072.000	277.399.000	100,00%	75,37%
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.340.520.900	1.277.225.000	95,28%	95,28%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92.970.000	90.844.200	97,71%	97,71%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92.970.000	90.844.200	150,00%	97,71%
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	83.700.000	76.475.600	97,31%	91,37%
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	83.700.000	76.475.600	25,00%	91,37%

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	222.842.500	218.652.404	101,09%	98,12%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	222.842.500	218.652.404	117,87%	98,12%
Pelayanan antar Kerja	127.992.700	127.229.806	117,87%	99,40%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	36.714.800	33.690.800	100,00%	91,76%
Perluasan Kesempatan Kerja	58.135.000	57.731.798	100,00%	99,31%
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	366.680.000	350.253.585	100,00%	95,52%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.620.000	107.885.679	97,53%	97,53%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	110.620.000	107.885.679	97,53%	97,53%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	256.060.000	242.367.906	94,65%	94,65%
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.850.000	205.417.506	94,73%	94,73%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.210.000	36.950.400	94,24%	94,24%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.284.210.847	8.859.787.297	112,70%	86,15%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.160.000	102.147.922	88,70%	88,70%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.348.000	18.839.272	97,37%	97,37%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.974.000	12.830.000	98,89%	98,89%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.184.000	6.130.000	99,13%	99,13%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.504.000	7.784.800	91,54%	91,54%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.184.000	6.110.000	98,80%	98,80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.882.000	38.143.000	78,03%	78,03%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.084.000	12.310.850	94,09%	94,09%

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPTTK Kabupaten Balangan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.880.463.047	6.540.074.413	82,99%	82,99%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.264.254.247	6.008.206.749	82,71%	82,71%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	579.920.000	495.651.264	85,47%	85,47%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.234.000	6.224.000	99,84%	99,84%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.156.800	8.104.400	99,36%	99,36%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.432.000	8.432.000	100,00%	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.234.000	6.234.000	100,00%	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.232.000	7.222.000	99,86%	99,86%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	423.500.000	414.687.253	97,92%	97,92%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.500.000	45.250.000	100,00%	95,26%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	376.000.000	369.437.253	98,25%	98,25%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.000.300	552.480.436	99,91%	99,91%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.205.400	20.205.400	119,05%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	333,33%	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.181.900	71.138.100	100,00%	99,94%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100,00%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.613.000	417.136.936	100,00%	99,89%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.997.500	764.898.997	100,00%	92,60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	397.310.000	355.561.497	89,49%	89,49%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.687.500	409.337.500	100,00%	95,49%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.090.000	485.498.276	100,00%	99,88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	377.850.000	377.258.276	99,84%	99,84%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.240.000	108.240.000	100,00%	100,00%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	62.370.000	49.305.880	100,00%	79,05%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.300.000	29.288.680	100,00%	80,69%
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36.300.000	29.288.680	40,00%	80,69%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	26.070.000	20.017.200	100,00%	76,78%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	11.850.000	7.420.000	16,67%	62,62%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	14.220.000	12.597.200	16,67%	88,59%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	265.640.000	262.450.510	221,71%	98,80%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	265.640.000	262.450.510	100,00%	98,80%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	12.980.000	12.362.300	50,00%	95,24%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	252.660.000	250.088.210	75,00%	98,98%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	133.400.000	130.326.000	100,00%	97,70%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	133.400.000	130.326.000	97,70%	97,70%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	14.000.000	14.000.000	100,00%	100,00%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	22.490.000	22.490.000	100,00%	100,00%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	52.050.000	49.090.000	94,31%	94,31%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	44.860.000	44.746.000	99,75%	99,75%

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	498.703.000	319.573.200	64,08%	64,08%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	498.703.000	319.573.200	68,04%	64,08%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	16.040.000	13.665.200	85,19%	85,19%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	399.590.000	237.005.100	120,00%	59,31%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	83.073.000	68.902.900	120,00%	82,94%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	145.910.000	142.522.203	97,68%	97,68%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.910.000	142.522.203	97,68%	97,68%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	145.910.000	142.522.203	100,00%	97,68%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	226.457.000	223.711.400	99,29%	98,79%
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	226.457.000	223.711.400	100,06%	98,79%
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	49.230.000	49.003.000	100,00%	99,54%
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	177.227.000	174.708.400	100,00%	98,58%
Jumlah Anggaran dari seluruh Program	14.977.488.447	13.127.898.486		

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel T-C.29.												
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota												
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	69	0	62 (B)	71 (BB)	100	63 (B)	71	103%
				Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	90	0	90	90	100	90	90	100%
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100	0	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	100	0	100	100	100	100%
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA - SKPD DPMTSP yang baik	100	0	100	100	100	100%
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang baik	100	0	0	100	100	100%
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase DPA - SKPD yang baik	100	0	0	100	100	100%
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang baik	100	0	0	100	100	100%

2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik	100	0	0	0	0	100	100	100%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	0	0	0	0	100	100	100%
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran sesuai ketentuan perundang-undangan	100	0	0	0	0	100	100	100%
2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Prognosis Realisasi Anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan	100	0	0	0	0	100	100	100%

2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	0	100	100	100	100	100	100%	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya, Jumlah pakaian kedaerahan	500	0	0	0	0%	100	100	20%
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	0	100	100	100	100	100	100%	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500	0	70	70	100	84	154	31%
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50	0	0	0	0	3	3	6%
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	301,270	0	20,224	20,224	100	40,262	60486	20%
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3	0	3	0	0	2	2	67%
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	1260	0	78	78	100	182	260	21%
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	0	7	7	100	0	7	100%	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	6	6	100	0	6	100%
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	1	1	100	0	1	100%

2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	0	100	100	100	12	12	100%
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	0	12	12	100	12	12	100%
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	0	100	100	100	12	12	100%
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak fungsi	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Layak Fungsi	100	0	100	100	100	0	100	100%

2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	12	0	2	2	100	2	4	33%
						Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	6	0	1	1	100	1	2	33%
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA/Perbup mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6	0	1	0	0	1	1	17%
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	5	0	0	0	0	0	0	0%
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	5	0	0	0	0	1	1	20%
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6	0	1	1	100	2	3	50%
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6	0	1	1	100	1	2	33%
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Terupdate	6	0	0	0	0	1	1	17%

2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	1.1E+12	0	0	0	0	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00	18%	
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	20	0	0	0	0	2	2	10%	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	10	0	0	0	0	2	2	20%
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal	10	0	0	0	0	2	2	20%
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100	0	100	100	100	100	100	100%	
					Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100	0	100	100	100	100	100	100%	
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100	0	100	100	100	100	100	100%	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3750	0	0	0	650	650	17%	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non perizinan yang dilayani	100	0	100	100	100	100	100	100%

2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	0	100	100	100	100	100	100	100%
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten	100	0	100	100	100	100	100	100	100%
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal	600	0	100	100	100	100	200	33%	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	150	0	25	25	100	25	50	33%	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya	150	0	25	25	100	25	50	33%	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100	0	100	100	100	100	100	100	100%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100	0	100	100	100	100	100	100	100%
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	36	0	6	6	100	6	12	33%	

2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	30	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK	70	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan	5	0	0	0	0	1	1	20%	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi	4	0	4%	0.46%	11.50%	4	4	100%	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarakan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarakan klaster kompetensi	24	0	24	24	100	24	48	200%	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarakan Klaster Kompetensi	Jumlah paket pelatihan klaster kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat / Jumlah calon pencari kerja yang kompeten dan memiliki keterampilan	84	0	1	1	100	3	4	5%	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah MoU dengan pihak ketiga	23	0	0	0	0	5	5	22%	
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK	100	0	0	0	0	100	100	100%	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terakreditasi	100	0	100	100	100	100	100	100%	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LKPS yang terakreditasi	13	0	2	2	100	3	5	38%	
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktifitas	100	0	0	0	0	100	100	100%	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	100	0	0	0	0	100	100	100%	

2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri	65	0	65	9.170	14.110	100	109	168%
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	3750	0	250	2,331	932.40	1500	3831	102%
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan perantaraan kerja	3750	0	250	2,331	932.40	40	2371	63%
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	25	0	0	0	0	40	40	160%
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirusaha Baru	100	0	0	0	0	5	5	5%
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi	100	0	100	100	100	100	100	100%
						Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100	0	100	100	100	100	100	100%
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	0	100	100	100	100	100	100%

2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100	0	100	100	100	100	100	100	100%
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipatit	100	0	0	0	0	100	100	100	100%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	100	0	100	100	100	100	100	100	100%
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	72	0	100	100	100	100	100	100	139%
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	90	0	10	10	100	0	10	11%	
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan	8	0	1	1	100	0	1	13%	
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19.5	0	19.12	18.77	98.17	18.91	38	193%	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi	66.3	0	63.8	63.8	100	0.5	64	97%	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah frekuensi Kegiatan Penguatan SDM	2	0	1	0	0%	2	2	100%	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Sarana dan prasarana yang disediakan	2	0	1	1	100	2	3	150%	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.2.1 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

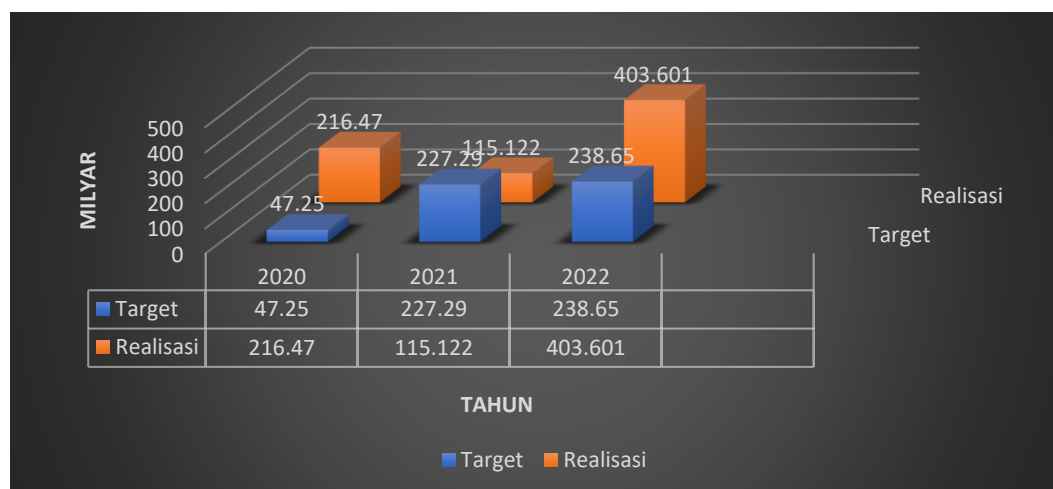
Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke II Kepala Daerah yakni **“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai sasaran yaitu : Meningkatnya investasi daerah. Dimana untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut ada indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yaitu : Realisasi Investasi

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	238,65 Milyar	403,601 Milyar	169,19 %	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Realisasi Investasi tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

- Realisasi Investasi pada tahun 2022 sebagaimana tabel adalah sebesar 403,601 Milyar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan realisasi 115,122 Milyar, hal ini berarti ada peningkatan pada pencapaian di tahun 2022 yakni sebesar 288,479 Milyar.
- Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sangat tinggi.

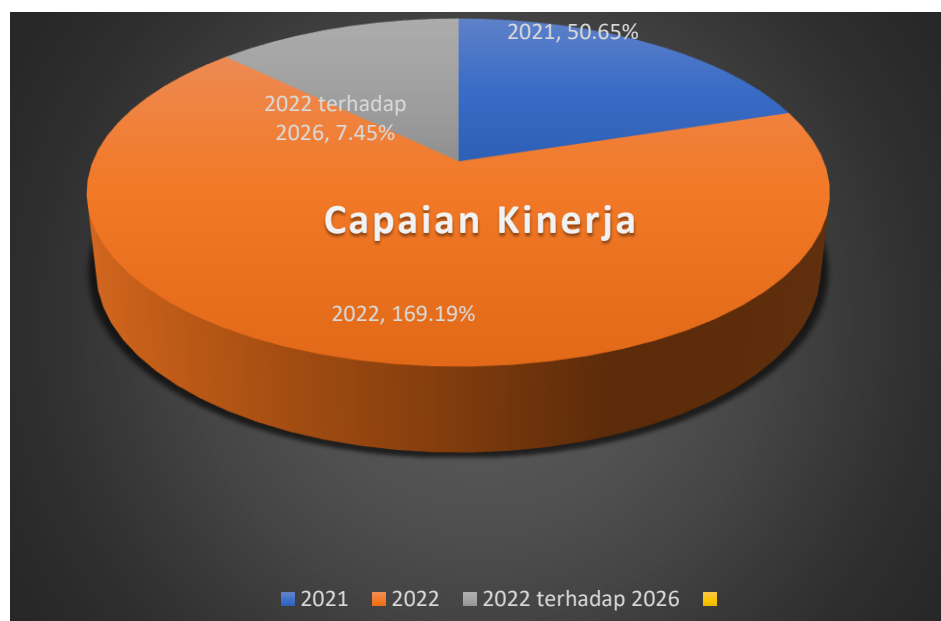


Grafik Realisasi Investasi

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Realisasi Investasi	50,65%	238,65 M	403,601 M	169,19 %	32,03 %
Rata-rata Capaian				169,19 %	32,03 %

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi tahun 2022 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 32,03 %.
- b. Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2022 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar Rp 403.601.380.621,00 (Empat Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribuan Enam Ratus Dua Pulu Satu Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi investasinya sebesar Rp 115,122,788,614,00 (Seratus Lima Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribuan Enam Ratus Empat Belas Rupiah). Disini terjadi mengalami peningkatan sebesar 288,479 Milyar



Grafik Capaian Kinerja Realisasi Investasi

Analisa Kendala Investasi Daerah

1. Pandemi covid 19 menyebabkan banyak usaha yang tidak bisa berperforma secara maksimal, sehingga penambahan investasi juga tidak maksimal.

2. Banyak para pelaku usaha masih enggan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak.
3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya.
4. PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM mengklasifikasi kriteria UMKM;
 - a) Permodalan usaha mikro paling banyak 1 milyar rupiah dan hasil penjualan paling banyak 2 milyar,
 - b) Permodalan usaha kecil antara 1 sampai 5 milyar rupiah dan hasil penjualan 2 sampai 15 milyar, dan
 - c) Permodalan usaha menengah antara 5 sampai 10 milyar rupiah hasil penjualan 15 sampai 50 milyar. LKPM tidak wajib dilaporkan oleh usaha berkategori mikro, sehingga banyak usaha mikro di kabupaten Balangan yang tidak menumbang besaran realisasi penanaman modal.
5. Beberapa pelaku usaha belum migrasi ke OSS RBA dan lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM.
6. Pada saat kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaku usaha, beberapa kendala yang ditemui antara lain;
 - a) tidak adanya alamat kantor yang jelas,
 - b) kesulitan dalam menemui pimpinan perusahaan/pemilik usaha.

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan;

1. Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM bagi pelaku usaha.
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan berusaha dan kiat-kiat berinvestasi bagi para pelaku usaha.
3. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.
4. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam memohon perizinan berusaha.

5. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha dan DPMPTSPTTK melalui kanal media sosial sehingga informasi terkait investasi/penanaman modal dapat dikomunikasikan dengan cepat.
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, khususnya bagi pelaku usaha yang dapat ditemui.
7. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.

2.2.2 Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	Angka Pengangguran Terbuka	2,43	3,98	36,21%	Sedang

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Angka Pengangguran Terbuka tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

- a. Angka Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 sebagaimana tabel adalah sebesar 3,98. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) dengan realisasi 2,44, hal ini berarti mengalami penurunan. Tetapi jika dibanding dengan 13 Kabupaten Kota se Kalsel Balangan berada di Peringkat 5 serta dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,74 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 5,86 maka Pengangguran di Kabupaten Balangan masih lebih rendah.
- b. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator realisasi investasi ini dapat dikatakan sedang.



Grafik Angka Pengangguran Terbuka

Tabel Capaian Kinerja Indikator Angka Pengangguran Terbuka

Indikator	2021	2022			Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Angka Pengangguran Terbuka	100,82%	2,43	3,98	36,21%	Sedang	57,79%

Terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Angka Pengangguran Terbuka dengan target di tahun 2022 sebesar 2,43% dan realisasi yang dicapai 3,98%. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator Angka Pengangguran Terbuka sebesar 36,21% dengan kategori capaian **Sedang**.

Hasil capaian tersebut berdasarkan jumlah pengangguran sebesar 2.830 jiwa berbanding dengan jumlah angkatan kerja sebesar 71.143 jiwa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan capaian:

1. Pada Tahun 2022 Dunia Kerja masih dalam proses pemulihan dan proses bangkit pasca pandemic Covid 19.
2. Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2022 dilakukan oleh BPS pada bulan Agustus pada saat kondisi sedang mencoba untuk pulih dan bangkit paska Pandemi Covid 19.
3. Bulan Agustus ketika dilakukan Survey Angkatan Kerja Nasional Tahun 2022 berbarengan dengan kelulusan bagi Siswa SMA sehingga mempengaruhi Jumlah Angkatan Kerja yang tidak bekerja.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/ hambatan pada proses pencapaian target ini adalah Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Balangan yang bertambah pasca kelulusan Siswa SMA dan kuliah sehingga menambah potensi peningkatan pada jumlah pengangguran terbuka.

Sejak terjadinya pandemi covid-19 di Kalimantan Selatan mengakibatkan menurunnya perekonomian, yang juga berdampak menurunnya lapangan usaha yang mempengaruhi aktivitas beberapa sektor, seperti sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor industri, rumah makan dan lain-lain.

Disamping itu juga sulitnya mendeteksi angka penempatan tenaga kerja, karena penerima kerja ataupun pekerja yang sudah dapat pekerjaan tidak lapor ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran adalah dengan meningkatkan keahlian, keterampilan, dan produktivitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya alam di pedesaan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut langkah yang akan dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan jumlah paket pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk para pencari kerja
2. Mengoptimalkan Bursa Kerja Online untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi pencari kerja
3. Mengadakan pelatihan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan di pedesaan serta meningkatkan peran UMKM.
4. Meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas pelatih guna meningkatkan kemampuan pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Swasta dalam meningkatkan kualitas Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Dan untuk menangani angka penempatan kerja yaitu dengan melakukan jemput bola/menyurati kepihak penerima pekerjaan untuk meminta/melaporkan data pencari kerja yang telah diterima bekerja.

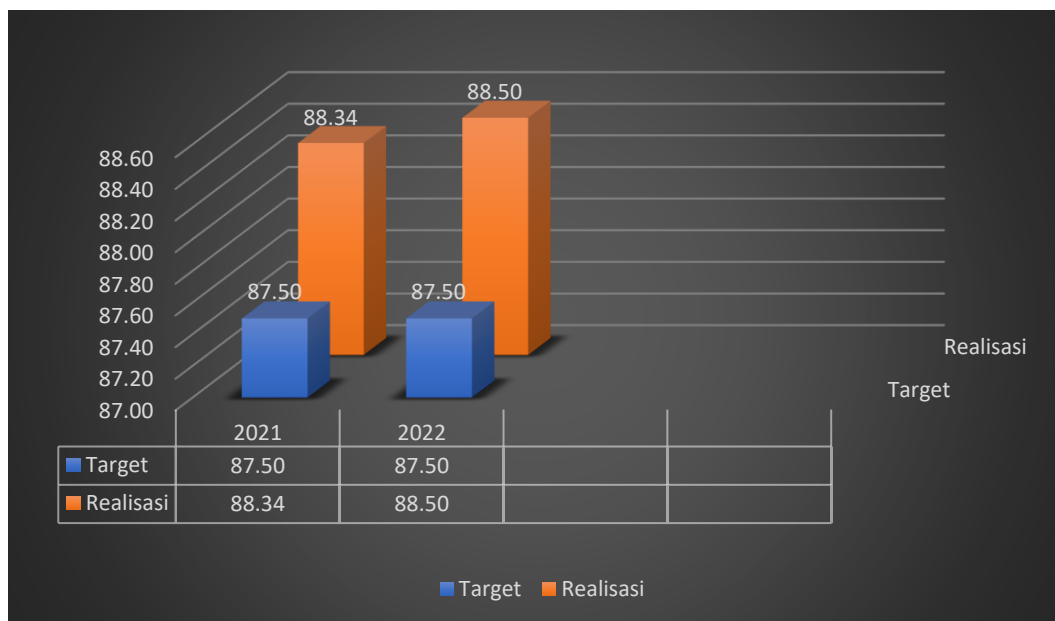
2.2.3 Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50	88,50	101,14%	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan adalah 88,50 setelah dikonversi, dengan nilai mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan sangat baik.
2. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini dapat dikatakan sangat tinggi.

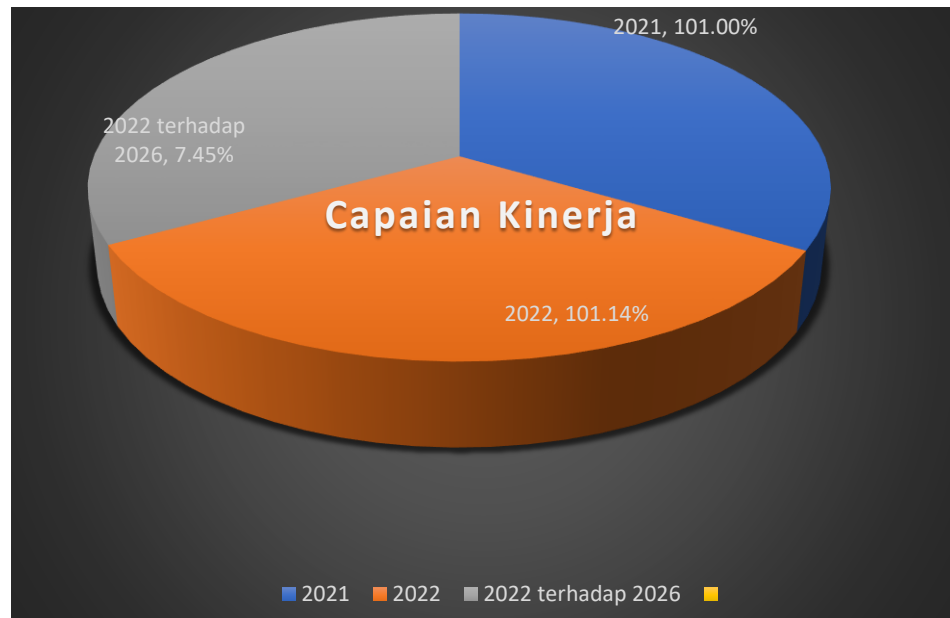


Grafik Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,34	87,50	88,50	101,14 %	99,44 %
Rata-rata Capaian				101,14 %	99,44 %

- a. Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan target capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 99,44 %.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 adalah 88,50 dengan Predikat Sangat Baik. Jika disbanding dengan capaian sebelumnya sebesar 88,34 maka capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan 0,18%.



Grafik Capaian Kinerja Realisasi IKM

1. Secara keseluruhan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terlihat dari unsur pelayanan tidak ada yang kurang baik atau tidak baik, hanya saja perlu dipertahankan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
2. Ruang pelayan telah sesuai dengan standar kenyamanan dan fasilitas ruang pelayan telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca dan flakat informasi mengenai pelayanan air minum gratis serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

Upaya yang telah dilaksanakan DPMPTSPTTK dalam upaya meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya:

1. Menjadikan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu wadah evaluasi kinerja pelayanan dan pendorong inovasi pelayanan.
2. Selalu memperhatikan dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai salah satu unsur pelayanan sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan yang telah diraih.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap unsur unsur pelayanan yang memiliki Nilai kurang seperti syarat dan prosedur pelayanan sehingga mempermudah para pelaku usaha.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel TC-30

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan												
No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (ttn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (ttn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Realisasi investasi		Realisasi investasi	47,25 M	227,29 M	238,65 M	250,59 M	115,12 M	403,601 M	250,59 M	263,12 M	
2	Angka pengangguran terbuka		Angka pengangguran terbuka	2,55%	2,46%	2,43%	2,40%	2,44%	3, 98%	2,40%	2,37%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK	86 (A)	87 (A)	87,50 (A)	88 (A)	88,34 (A)	88,50 (A)	88 (A)	88,50 (A)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Adapun Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah :

1. Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
2. Belum ada Peraturan Daerah tentang kemudahan berinvestasi.
3. Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing.
4. Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
5. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data yang akurat.
6. Kurangnya sarana prasarana, peralatan praktek pada bidang-bidang juga di BLK, sebagai lembaga yang diharapkan menjadi fungsi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
7. Kualifikasi Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan pasar kerja;
8. Produktivitas tenaga kerja kurang diperlukan program pelatihan secara berkelanjutan;

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
4. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.
5. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.
6. Optimalisasi Balai Latihan Kerja dengan meningkatkan Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024, merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana Kerja SKPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel T-C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja</i>	30%	32,718,000.00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja</i>	30%	34,353,900.00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kabupaten Balangan	<i>Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK</i>	70%	32,718,000.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kabupaten Balangan	<i>Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK</i>	70%	34,353,900.00	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>	10 Orang	32,718,000.00	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>	10 Orang	34,353,900.00	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	<i>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi</i>	60%	2,837,654,328.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	<i>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi</i>	60%	2,979,537,044.40	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Balangan	<i>Persentase peserta pelatihan yang kompeten</i>	90%	1,878,444,128.00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Balangan	<i>Persentase peserta pelatihan yang kompeten</i>	90%	1,972,366,334.40	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	100 Orang	552,320,000.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	100 Orang	579,936,000.00	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	4 Lembaga	647,421,000.00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	4 Lembaga	679,792,050.00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	96 Orang	678,703,128.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	96 Orang	712,638,284.40	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah LPK Swasta yang menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</i>	10 LPKS	683,757,200.00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah LPK Swasta yang menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</i>	10 LPKS	717,945,060.00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	4 Lembaga	683,757,200.00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Balangan	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	4 Lembaga	717,945,060.00	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kabupaten Balangan	<i>Persentase peningkatan produktifitas wirausaha kecil</i>	20%	65,373,000.00	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kabupaten Balangan	<i>Persentase peningkatan produktifitas wirausaha kecil</i>	20%	68,641,650.00	

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	65,373,000.00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	68,641,650.00
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan produktivitasnya	400 Tenaga Kerja	210,080,000.00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan produktivitasnya	400 Tenaga Kerja	220,584,000.00
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	210,080,000.00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	220,584,000.00
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	60%	458,649,200.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	60%	481,581,660.00
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	750 Orang	330,324,000.00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	750 Orang	346,840,200.00
			Persentase kerjasama antar kerja	100%				Persentase kerjasama antar kerja	100%	
	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	120 Orang	73,639,000.00	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	120 Orang	77,320,950.00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	350 Orang	134,049,000.00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	350 Orang	140,751,450.00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	50,692,000.00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	53,226,600.00
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	71,944,000.00	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	75,541,200.00
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang aktif	5 LPTKS	14,155,000.00	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang aktif	5 LPTKS	14,862,750.00
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kabupaten Balangan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	14,155,000.00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kabupaten Balangan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	14,862,750.00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten Balangan	Persentase informasi pasar kerja yang disebarluaskan	100%	114,170,200.00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten Balangan	Persentase informasi pasar kerja yang disebarluaskan	100%	119,878,710.00
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	34,259,000.00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	35,971,950.00
	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	79,911,200.00	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	83,906,760.00
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Balangan	Persentase PPHI yang difasilitasi	100%	6,281,754,900.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Balangan	Persentase PPHI yang difasilitasi	100%	6,595,842,645.00
			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%				Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	30 Perusahaan	6,117,320,000.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	30 Perusahaan	6,423,186,000.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	10,000,000.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	10,500,000.00
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	6,107,320,000.00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	6,412,686,000.00
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	'Persenentase perkara/pengaduan HI yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	164,434,900.00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	'Persenentase perkara/pengaduan HI yang difasilitasi penyelesaiannya	100%	172,656,645.00
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	88,139,900.00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	92,546,895.00
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	16,690,000.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	17,524,500.00
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	59,605,000.00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	62,585,250.00
5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74,40 Nilai	11,879,379,476.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Balangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74,40 Nilai	12,473,348,449.80
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	130,855,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	137,397,750.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58,740,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61,677,000.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	31,755,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	33,342,750.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	40,360,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	42,378,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	9,162,857,176.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	9,621,000,034.80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,594,790,616.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,974,530,146.80

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,482,517,560.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,556,643,438.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	49,127,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	51,583,350.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	36,422,000.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	38,243,100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	219,852,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	230,844,600.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160 Paket	38,612,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	160 Paket	40,542,600.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	181,240,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	190,302,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	749,680,400.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	787,164,420.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43,940,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	46,137,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	73,402,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	77,072,100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,118,400.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,624,320.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	622,220,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	653,331,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	858,822,700.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	901,763,835.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371,481,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390,055,050.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	487,341,700.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	511,708,785.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	757,312,200.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Balangan	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	795,177,810.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	531,144,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	557,701,200.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	226,168,200.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	237,476,610.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	1 Potensi Investasi Daerah	107,192,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	1 Potensi Investasi Daerah	112,551,600.00
			Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 Kerjasama				Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 Kerjasama	

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSP/PTK Kabupaten Balangan

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Investor yang mendapatkan insentif/kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	56,336,000.00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Investor yang mendapatkan insentif/kemudahan berusaha (berinvestasi)	100%	59,152,800.00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	36,766,000.00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	38,604,300.00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	19,570,000.00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	20,548,500.00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi Investasi baru	1 Potensi	50,856,000.00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Potensi Investasi baru	1 Potensi	53,398,800.00
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29,906,000.00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31,401,300.00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,950,000.00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21,997,500.00
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	220 Milyar	292,902,900.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	220 Milyar	307,548,045.00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Kegiatan	292,902,900.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	2 Kegiatan	307,548,045.00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	193,434,500.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	203,106,225.00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	99,468,400.00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	104,441,820.00
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%	369,722,000.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%	388,208,100.00
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100%	369,722,000.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100%	388,208,100.00
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	59,030,000.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	61,981,500.00
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	232,292,000.00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	243,906,600.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	700 Kegiatan Usaha	78,400,000.00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	700 Kegiatan Usaha	82,320,000.00
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	165,448,000.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	173,720,400.00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100%	165,448,000.00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	100%	173,720,400.00
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha	63,566,000.00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Balangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha	66,744,300.00
	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	101,882,000.00	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Balangan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	106,976,100.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	137,895,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Balangan	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	144,789,750.00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	137,895,000.00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	144,789,750.00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	137,895,000.00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	144,789,750.00
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	185,272,400.00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	194,536,020.00
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	20 orang	185,272,400.00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	20 orang	194,536,020.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	20,798,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	21,837,900.00
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi	1 Dokumen	164,474,400.00	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi	1 Dokumen	172,698,120.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPTTK Kabupaten Balangan

			<i>Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>					<i>Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>			
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	<i>Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi</i>	19.20%	128,999,700.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	<i>Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi</i>	19.20%	135,449,685.00	
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kawasan Transmigrasi	<i>Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi</i>	0.5 ha	128,999,700.00	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kawasan Transmigrasi	<i>Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi</i>	0.5 ha	135,449,685.00	
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	54 Kepala Keluarga	15,052,500.00	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	54 Kepala Keluarga	15,805,125.00	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	1 Satuan Permukiman	113,947,200.00	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	1 Satuan Permukiman	119,644,560.00	
					22,877,587,904.00					24,021,467,299.20	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berkenaan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat dimana dalam hal ini diperoleh dari hasil Musrenbang Kecamatan, untuk tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel T-C.32.					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023					
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kalimantan Selatan/Balangan/Paringin					
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Balangan	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	Usulan Musrenbang dan Pokir
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Balangan	Persentase penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	Persen	Usulan Musrenbang dan Pokir
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Balangan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	Usulan Musrenbang dan Pokir
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja	Kabupaten Balangan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	Usulan Musrenbang dan Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Sinergitas Kebijakan Daerah

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dikerja dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah,waktu yang cepat dan biaya transparan.Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Selaras dengan agenda pembangunan Nasional, arah kebijakan dan strategi pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian dari arah kebijakan dan strategi pembangunan Nasional, pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan wilayah. Adapun urusan-urusan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu:

1. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan
- c. Optimalisasi kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja
- d. Meningkatkan informasi lowongan kerja
- e. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja

2. Urusan Transmigrasi

- a. Pembinaan masyarakat Transmigrasi Lokal
- b. Meningkatkan sarana prasarana di kawasan transmigrasi
- c. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar sector dan antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Permendagri No 40 Tahun 2020

Prioritas Bidang Pembangunan Nasional

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran dalam penerapan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan tidaklah lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang ada pada Misi II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif

Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah

1. Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi daerah;
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Target Pembangunan Nasional

- a. Nilai realisasi penanaman modal Rp 991,3 triliun;
- b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
- c. Perusahaan besar yang bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah : 120 perusahaan;
- d. Sebaran penanaman modal yang berkualitas (di luar Jawa) : 46,9%;
- e. Nilai komitmen hasil promosi investasi terfokus sektor dan negara : Rp 1.652,2 triliun;
- f. Kontribusi investasi dalam negeri/ PMDN termasuk usaha mikro, kecil menengah; 47,8 %;
- g. Peringkat kemudahan berusaha: 65 (Peringkat EoDB).

Hal – Hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2024

- a. Pengawasan realisasi investasi di daerah.
- b. Perlunya hilirisasi sumber daya alam di daerah.
- c. Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional khususnya usaha mikro, kecil menengah di daerah proyek.
- d. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja.
- e. Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- f. Promosi investasi terfokus berdasarkan sector dan yang sejalan dengan prioritas nasional.
- g. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya usaha mikro, kecil menengah.
- h. Penyederhanaan Perizinan di daerah.

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor
2. Memutus rantai “perantara/calor” dalam pengurusan perizinan dan non perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.
3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah mudah cepat dan transparan serta tanggapan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Balangan. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan kompetensi integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
7. Pembinaan/ pengawasan dan monev.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2024

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam

rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan di tahun 2024 adalah melanjutkan visi dan misi dari kepala daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumberdaya manusia ,melalui misi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sehingga dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan tersebut lebih difokuskan pada penajaman IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah berupa peningkatan investasi daerah.

Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak 12 program, 24 kegiatan yang terdiri dari 52 Sub Kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan BerUsaha Berbasis Resiko
- 3) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan BerUsaha Berbasis Resiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 2) Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7. Program Perencanaan Tenaga Kerja

A. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sub Kegiatan

- 1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 3) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

B. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

C. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

D. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

9. Program Penempatan Tenaga Kerja

A. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pelayanan antar Kerja
- 2) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 3) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 4) Perluasan Kesempatan Kerja

B. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

C. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- 1) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
- 2) Job Fair/Bursa Kerja

10. Program Hubungan Industrial

A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Sub Kegiatan

- 1) Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulam masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			22,877,587,904.00					22,604,885,802.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,563,315,804.00					22,195,901,610.00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9,610,776,428.00					10,062,480,509.00
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja</i>	30 %	32,718,000.00				-	38,565,600.00
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK</i>	70 %	32,718,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja dan Perusahaan	-	38,565,600.00
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								
			<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>	10 Orang	32,718,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja dan Perusahaan		38,565,600.00

2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase tenaga kerja yang kompeten/bersertifikat kompetensi Persentase tenaga kerja yang kompetensi/bersertifikat kompetensi</i>	60 % 60 %	2,837,654,328.00				-	3,443,875,000.00
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Persentase peserta pelatihan yang kompeten</i>	90 %	1,878,444,128.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja	-	2,290,305,000.00
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi								
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>	100 Orang	552,320,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja		600,000,000.00
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja								
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	4 Lembaga	647,421,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja		413,080,000.00

	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi								
			<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n</i>	96 Orang	678,703,128.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja		1,277,225,000.00
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Jumlah LPK Swasta yang menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja</i>	10 LPKS	683,757,200.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	LPKS / Tenaga Kerja	-	63,360,000.00
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	4 Lembaga	683,757,200.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	LPKS / Tenaga Kerja		63,360,000.00
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Persentase peningkatan produktifitas wirausaha kecil</i>	20 %	65,373,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja dan Pengusaha Kecil	-	711,785,000.00
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas</i>	20 Perusahaan	65,373,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja dan Pengusaha Kecil		711,785,000.00
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensinya dan produktivitasnya</i>	400 Tenaga Kerja	210,080,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja	-	378,425,000.00
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>	1 Dokumen	210,080,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		378,425,000.00
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri</i>	60 %	458,649,200.00				-	533,605,000.00
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja Persentase kerjasama antar kerja</i>	750 Orang 100 %	330,324,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja	-	285,191,000.00
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>	120 Orang	73,639,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		83,506,000.00
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	350 Orang	134,049,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		69,04 9,000.00
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	5 Orang	50,692,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		60,69 2,000.00
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja								
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	20 Orang	71,944,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		71,94 4,000.00
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang aktif</i>	5 LPTKS	14,155,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	LPTKS	-	14,155,000.00

	2.07.04.2. 02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS								
			<i>Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku</i>	5 Lembaga	14,155,000.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	LPTKS		14,155,000.00
	2.07.04.2. 03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase informasi pasar kerja yang disebarluaskan</i>	100 %	114,170,200.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja	-	234,259,000.00
	2.07.04.2. 03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online								
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>	1 Dokumen	34,259,000.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		34,259,000.00
	2.07.04.2. 03.0003	Job Fair/Bursa Kerja								
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	20 Orang	79,911,200.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		200,000,000.00
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase PPHI yang difasilitasi Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial</i>	100 % 100 %	6,281,754,900.00				-	6,046,434,909.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i>	30 Perusahaan	6,117,320,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perusahaan	-	5,882,000,009.00
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
		<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>	5 Perusahaan	10,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perusahaan		10,000,000.00
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
		<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	1 Laporan	6,107,320,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perusahaan		5,872,000,009.00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>'Persenentase perkara/pengaduan HI yang difasilitasi penyelesaiannya</i>	100 %	164,434,900.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja	-	164,434,900.00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>	5 Perkara	88,139,900.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		88,139,900.00
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	5 Perkara	16,690,000.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		16,690,000.00
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	1 Lembaga	59,605,000.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Mening katkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Tenaga Kerja		59,605,000.00
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			12,952,539,376.00					12,133,421,101.00
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</i>	74,40 Nilai	11,879,379,476.00				-	11,076,010,801.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPTTK Kabupaten Balangan

2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik</i>	100 %	130,855,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD	-	108,173,000.00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	58,740,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		39,000,000.00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	1 Dokumen	31,755,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		31,030,000.00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	40,360,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		38,143,000.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 %	9,162,857,176.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS	-	8,899,738,431.00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	50 Orang/bulan	7,594,790,616.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		7,331,671,071.00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	1,482,517,560.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		1,482,517,560.00
2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	0 Dokumen	49,127,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		49,127,800.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPTTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	49,127,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		49,127,800.00
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2 Dokumen	36,422,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		36,422,000.00
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	219,852,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS	-	238,612,000.00
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	160 Paket	38,612,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		38,612,000.00
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	45 Orang	181,240,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	PNS dan Non PNS		200,000,000.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum</i>	100 %	749,680,400.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD	-	751,898,200.00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	43,940,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		43,729,800.00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	73,402,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		73,050,000.00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	10,118,400.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		10,118,400.00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	622,220,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		625,000,000.00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	858,822,700.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD	-	516,466,120.00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	371,481,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		44,980,920.00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	487,341,700.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	SKPD		471,485,200.00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	757,312,200.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Sarana dan Prasarana SKPD	-	561,123,050.00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	32 Unit	531,144,000.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Sarana dan Prasarana SKPD		334,954,850.00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	226,168,200.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Sarana dan Prasarana SKPD		226,168,200.00

2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	1 Potensi Investasi Daerah 2 Kerjasama	107,192,000.00				-	134,519,200.00
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Investor yang mendapatkan insentif /kemudahan berusaha (berinvestasi)</i>	100 %	56,336,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor	-	50,766,000.00
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
			<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	36,766,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		25,766,000.00
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	2 Dokumen	19,570,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	02. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		25,000,000.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Potensi Investasi baru</i>	1 Potensi	50,856,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Calon Investor	-	3,200.00	83,75
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	29,906,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Calon Investor		6,000.00	31,15
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	20,950,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Calon Investor		7,200.00	52,59
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi</i>	220 Milyar	292,902,900.00				-		280,326,900.00
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi</i>	2 Kegiatan	292,902,900.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Calon Investor	-		280,326,900.00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	193,434,500.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Calon Investor		180,858,500.00
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	2 Dokumen	99,468,400.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Calon Investor		99,468,400.00
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP</i> <i>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP</i>	100 % 100 %	369,722,000.00				-	328,549,800.00
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan</i>	100 %	369,722,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	328,549,800.00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	700 Pelaku Usaha	59,030,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		75,367,600.00
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	10 Pelaku Usaha	232,292,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		232,927,200.00
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	700 Kegiatan Usaha	78,400,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		20,255,000.00
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	165,448,000.00				-	165,508,000.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM</i>	100 %	165,448,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	165,508,000.00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	180 Pelaku Usaha	63,566,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		76,616,000.00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal								
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	25 Kegiatan Usaha	101,882,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		88,892,000.00
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</i>	100 %	137,895,000.00				-	148,506,400.00

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</i>	100 % 100 %	137,895,000.00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	148,506,400.00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	6 Dokumen	137,895,000.00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		148,506,400.00
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			314,272,100.00					408,984,192.00
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			314,272,100.00					408,984,192.00
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase warga transmigrasi yang terampil</i>	16 %	185,272,400.00				-	185,272,792.00
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga transmigrasi yang terampil</i>	20 orang	185,272,400.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Warga Transmigrasi	-	185,272,792.00
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPPTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan	20,798,000.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Warga Transmigrasi		20,798,000.00
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran								
			<i>Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>	1 Dokumen	164,474,400.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Warga Transmigrasi		164,474,792.00
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi</i>	19.20 %	128,999,700.00				-	223,711,400.00
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<i>Bertambahnya Lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi warga transmigrasi</i>	0.5 ha	128,999,700.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Warga Transmigrasi	-	223,711,400.00
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman								

Rencana Kerja Tahun 2024 DMPPTSPTTK Kabupaten Balangan

			<i>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</i>	54 Kepala Keluarga	15,052,500.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Warga Transmigrasi		49,003,000.00
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman								
			<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>	1 Satuan Permukiman	113,947,200.00	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	01. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Warga Transmigrasi		174,708,400.00
		J U M L A H			22,877,587,904.00					22,604,885,802.00

4.2 Analisis Sosial Ekonomi

Ketika mendengar kata ‘investasi’, mungkin yang terlintas adalah menanamkan aset untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Namun investasi tidak hanya seputar ekonomi saja, tetapi ada juga yang disebut sebagai investasi sosial. Menurut International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), investasi sosial merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Tujuannya, untuk memberikan keuntungan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

International Finance Corporation (IFC) juga mendefinisikan investasi sosial sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan untuk membantu masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan dan bertujuan untuk pengembangan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga dapat mengambil keuntungan dari peluang yang diciptakan dengan cara yang berkelanjutan dan mendukung tujuan perusahaan.

Salah satu praktik investasi sosial yang saat ini gencar dilakukan adalah corporate social responsibility (CSR) dengan berbagai macam program, yang tentunya berkelanjutan. Praktik ini akan memberikan manfaat pada masyarakat, sebagai target, maupun perusahaan. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat (IFC, 2010),

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Sedangkan berikut ini manfaat bagi perusahaan dari investasi sosial

1. Mendapatkan social license to operate
2. Menjadi bagian dari manajemen risiko sosial dan lingkungan
3. Menciptakan keunggulan yang kompetitif
4. Meningkatkan reputasi perusahaan
5. Menaati dan menjalankan regulasi yang berlaku
6. Kerja sama dengan stakeholder, seperti pemerintah dalam program pembangunan
7. Meningkatkan loyalitas konsumen

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, (perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi dapat dilihat dari pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, juga kondisi pemukiman. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi

Kehidupan sosial ekonomi adalah kehidupan sosial yang menunjukkan pada objeknya yaitu masyarakat yang menunjukkan pada kegiatan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan dalam lingkup pekerjaan. Sosial ekonomi merupakan pertanda yang menunjukkan kegiatan ekonomi secara sosial dalam sistem kemasyarakatan, dimana keadaan masyarakat dalam hidupnya baik menyangkut taraf hidup, ilmu pengetahuan, hubungan sosial dan tingkat ekonominya. Perubahan sosial ekonomi juga termasuk didalamnya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat untuk mencapai suatu arah yang lebih baik. Begitupun yang menjadi keinginan dari para Tenaga Kerja Wanita dan keluarganya mereka berharap dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dapat membawa perubahan pada perekonomian keluarga. Bagi keluarga yang ditinggalkan dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita sangat menunjang perekonomian keluarga terbukti mereka dapat membangun rumah ataupun memperbaiki taraf hidup perekonomian keluarga dengan pendapatannya. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran kehidupan masyarakat dari sederhana menjadi modern dan kemampuan mereka menyekolahkan anak-anak mereka.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (Empat) tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan diharapkan Tupoksi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten dan dapat mendukung pencapaian Target PAD Tahun 2024.

TABEL KERJA
MAPPING PEMUTAKHIRAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 DAN HASIL EVALUASI CASCADING PERMENPAN RB
TAHUN 2023

SKPD : BAPPEDALITBANG

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja, Jumlah Dokumen evaluasi RTK			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
04	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan penyusunan RTK mikro			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang
06	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah dokumen/terusannya LKIP, LPPD, Laporan e-Monev Bappeda			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Tenaga		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tenaga		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LKPS yang terakreditasi			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Orang
03	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta	Jumlah MoU dengan pihak ketiga			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	Kesepakatan		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan	Lembaga
05	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sarana Pelatihan BLK			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit
07	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LKPS yang terakreditasi			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LKPS yang terakreditasi			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga
02	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pakuin dinas beserta kelengkapannya			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara	Sumber		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		
11	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga	Upaya peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM)			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara	Perizinan
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	Perusahaan		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		
01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan			Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	Perusahaan		Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan	Perusahaan
02	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing	Dokumen		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah		
05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga	Data tingkat produktifitas total			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing	Dokumen
06	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
09	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan	Orang		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Orang
09	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
11	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang teresap melalui kegiatan Padat Karya Produktif, TTG dan atau TKM/ Wirausaha Baru			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang
02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah LPTKS yang memiliki izin/ terdaftar di Kabupaten Balangan			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
04	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah peralatan kerja terpelihara dgn baik,persentase ruangan /tempat kerja yg bersih/tersedianya kebutuhan alat tulis kantor			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Penempatan /penyerapan tenaga kerja melalui LPTKS, Jumlah			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai	Lembaga		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai	Lembaga
02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah dokumen informasi pasar kerja			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
10	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah konten/ perangkat yang dikelola			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah informasi lowongan dan ketersediaan tenaga kerja			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang
	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang membuka lowongan kerja			Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
02	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI/ CPMI / Masyarakat yang mendapatkan layanan			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
03	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI dan aparatur desa yang mendapatkan informasi			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
05	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang mendapatkan rekomendasi paspor dan ID TKI			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
07	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah purna PMI dan keluarga yang mengikuti pelatihan kewirausahaan			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data & Informasi perencanaan pembangunan daerah			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah Yang dikelola			Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPH yang difasilitasi, Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab		
01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan
03	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA/Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP, Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Ko		

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dievaluasi			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dokumen		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kegiatan Usaha
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Jenis Layanan Perizinan dan Non perizinan yang dilayani			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan investasi di Kabupaten			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah monitoring Pelaku Usaha			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Dikaji dan Dimasukkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Dikaji dan Dimasukkan	Dokumen
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan bidang kewilayahan			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Dokumen		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dihasilkan dan Dikaji Sama-sama di Daerah Lain	Dokumen
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan SKPD			Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah			Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan tanaman			Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor dengan instansi yang berkaitan dengan ketransmigrasian			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Laporan		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Laporan
	Penyiapan Lingkungan Humani Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Penyiapan Lingkungan Humani Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			Penyiapan Lingkungan Humani Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Hidup)	Dokumen		Penyiapan Lingkungan Humani Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Hidup)	Dokumen
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Lokasi Kawasan Transmigrasi			Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran	Kepala Keluarga		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran	Kepala Keluarga
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penempatan dan Pemindahan Transmigran			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah frekuensi Kegiatan Penyuluhan			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga
	Pelatihan Transmigrasi	Persentase Kehadiran Warga yang diberi pelatihan			Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa			Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga		Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan			Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK		Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah data kelibangan dan peraturan yang terkelola			Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi		Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi
	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah penelitian & pengembangan daerah bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan yg dimanfaatkan SKPD			Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang		Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang
	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Calon Transmigran Penduduk Asal			Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK		Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
	Fasilitas Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kesehatan			Fasilitas Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK		Fasilitas Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah penelitian dan pengembangan pariwisata			Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	KK		Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	KK

SEBELUMNYA				MEJADI				PEMUTAKHIRAN (TAHUN 2023)			
KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	jumlah penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK		Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah inovasi dan teknologi yg dijarang			Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	KK		Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	KK
	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK		Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK
	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah diseminasi, prosedur dan metode penyenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif			Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	Orang		Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	Orang
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK		Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK
	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)				Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket		Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan	Paket
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi				Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap				Pengembangan satuan Permukiman pada Tahap		
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan				Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka	Satuan Permukiman		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka	Satuan Permukiman

KETERANGAN :

- 1 Indikator Program menggunakan indikator RPJMD
- 2 Indikator Kegiatan menggunakan indikator Evaluasi Cascading
- 3 Indikator Sub Kegiatan menggunakan indikator Kepme

MENGETAHUI :
KEPALA BAPPEDALITBANG

NAMA
NIP.

DISUSUN OLEH :
KASUBBAG PERENCANAAN
BAPPEDALITBANG

NAMA
NIP.